



Intermezo Edisi 17 Agustus 2026

HUT ke-81 NKRI

Jan Hoesada , Komite Kerja KSAP

Kabinet bekerja-keras tahun 2025 dan 2026 untuk pelaporan kinerja NKRI pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 2026. Ringkasan AI menyatakan bahwa tanggal 17 Agustus 2026 jatuh pada hari Senin, yang merupakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rincian Peringatan dan Libur:

- Hari/Tanggal: Senin, 17 Agustus 2026
- Status: Libur nasional resmi
- Akhir Pekan Panjang (*Long Weekend*): Menghasilkan libur 3 hari dari Sabtu, 15 Agustus hingga Senin, 17 Agustus 2026

Presiden Prabowo Subianto berencana memimpin upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta. Lokasi Utama: Dipusatkan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Persiapan: Pemerintah, melalui Mensesneg, memastikan rangkaian acara kenegaraan dan koordinasi melibatkan UMKM sedang dimatangkan di Jakarta. Sidang Evaluasi: Menjelang 17 Agustus, Presiden telah memimpin Sidang Kabinet Paripurna untuk mengevaluasi program kerja paruh tahunan pemerintahan.

Ringkasan AI menyatakan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara nasional berada pada kisaran skor 75,52 hingga 80,33 berdasarkan metode baru, sementara lembaga internasional The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat skor global Indonesia di angka 6,44. Komponen Pengukuran IDI adalah sbb :

- Kebebasan Sipil: Menilai hak warga berpendapat, berkumpul, dan kebebasan dari diskriminasi.
- Hak-Hak Politik: Mengukur partisipasi pemilu serta keterlibatan politik masyarakat.
- Lembaga Demokrasi: Menyoroti kinerja eksekutif, legislatif, yudikatif, dan partai.

Kondisi Terkini

- Tingkat Nasional: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kualitas demokrasi Indonesia ada di kategori sedang hingga baik tergantung wilayah.
- Tantangan Utama: Penilaian global menyoroti kelemahan pada aspek budaya politik dan kebebasan sipil.

Ringkasan AI menyatakan kinerja makroekonomi Indonesia pada awal tahun 2026 mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,61% pada triwulan pertama, didukung oleh stabilitas fiskal yang sehat dan ketahanan ekonomi domestik di tengah dinamika global.

Indikator Utama Ekonomi Makro

- Pertumbuhan PDB: Mencapai 5,61% (yoy) pada triwulan I-2026 dengan besaran Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun.
- Pendapatan Negara: Tercatat sebesar Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target APBN hingga semester I-2026, tumbuh positif 21,4% (yoy).
- Target Asumsi Dasar: Pertumbuhan ekonomi nasional dipatok pada kisaran 5,4% dengan tingkat inflasi yang terjaga di sekitar 2,5%.

Faktor Pendukung dan Risiko

- Ketahanan Domestik: Ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta kelanjutan pembangunan infrastruktur logistik.
- Tantangan Global: Kebijakan pertumbuhan yang selektif diterapkan oleh para investor akibat ketidakpastian ekonomi global.

Ringkasan AI menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik dan citra positif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2026, yang didukung oleh pencapaian indeks kepercayaan mencapai 82,4%, citra positif di angka 71,5%, serta kepuasan masyarakat sebesar 67,6% berdasarkan data survei.

Indeks Keamanan dan Penilaian Publik

- Tingkat Kepercayaan: Berdasarkan Survei Litbang Kompas Triwulan II 2026, kepercayaan publik terhadap Polri naik menjadi 82,4%.
- Citra Positif: Meningkat dari 64,4% pada tahun sebelumnya menjadi 71,5%.
- Tingkat Kepuasan: Layanan dan kinerja kepolisian mencatat angka kepuasan masyarakat pada tingkat 67,6%.

Peran Kepolisian dalam Keamanan Sosial

- Penegakan Hukum & Kejahatan: Fokus pada pemberantasan narkoba, judi online, perdagangan orang, dan kejahatan siber.
- Dukungan Program Sosial: Terlibat dalam penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Transformasi Pelayanan: Mengembangkan layanan publik berbasis digital yang lebih humanis, transparan, dan responsif bagi masyarakat.

Ringkasan AI menyatakan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tercatat sebesar US\$ 145,6 miliar, meningkat tipis dari posisi bulan Mei 2026 yang sebesar US\$ 144,9 miliar.

Perkembangan Cadangan Devisa 2026

- Akhir Juni 2026: US\$ 145,6 miliar (naik dari bulan sebelumnya).
- Akhir Mei 2026: US\$ 144,9 miliar.
- Akhir April 2026: US\$ 146,2 miliar.

Kecukupan Sektor Eksternal

- Berada jauh di atas standar kecukupan internasional (sekitar 3 bulan impor).
- Mampu mendukung pembiayaan impor serta pembayaran utang luar negeri pemerintah dan menjaga stabilitas makroekonomi.
 - Informasi resmi dan pembaruan data dapat dipantau melalui Bank Indonesia.



Ringkasan AI menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di skor **34** dari skala 0 hingga 100, dengan posisi peringkat global di nomor 109 dari 180 negara. Data ini dirilis oleh Transparency International Indonesia sebagai evaluasi atas tata kelola dan integritas sektor publik. Catatan Penting Indeks Korupsi

- Skor dan Peringkat: Skor Indonesia turun menjadi 34 (sebelumnya 37), dan peringkatnya merosot ke posisi 109 dari posisi 99 pada periode penilaian sebelumnya.
 - Faktor Penurunan: Penilaian ini menyoroti melemahnya penegakan hukum, masalah integritas di sektor publik, serta tantangan dalam transparansi tata kelola pemerintahan.
- Tindak Lanjut: Situasi ini menjadi acuan bagi lembaga pengawas seperti KPK untuk mendorong perbaikan sistem pencegahan korupsi di berbagai daerah.

Ringkasan AI menyatakan bahwa peringkat kinerja dan daya saing pemerintahan atau kabinet Indonesia secara global pada tahun 2026 tercermin melalui laporan IMD World Competitiveness Ranking (WCR), di mana Indonesia berada di posisi ke-48 dunia.

Rincian Indeks Daya Saing Indonesia 2026

- Posisi Global: Peringkat ke-48 dari total negara yang dinilai, mengalami penurunan dari posisi tahun sebelumnya.
- Efisiensi Pemerintah (*Government Efficiency*): Berada di posisi ke-38 dunia.

- Kinerja Ekonomi (*Economic Performance*): Menjadi indikator terbaik bagi Indonesia yang berada di peringkat ke-24 dunia.
- Efisiensi Bisnis: Menempati peringkat ke-50 dunia.

Daftar nama anggota BPUPKI dan PPPKI 1945

Pimpinan dan Tokoh Utama BPUPKI

- K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (Ketua)
- R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
- Ichibangase Yosio (Wakil Ketua)
- Ir. Soekarno (Anggota)
- Drs. Moh. Hatta (Anggota)
- Mr. Muhammad Yamin (Anggota)



Jumlah anggota BPUPKI sebesar 66 orang mewakili berbagai suku dan golongan masyarakat, sebagian mendapat bintang-jasa sebagai pahlawan NKRI. Diantara 66 orang itu terdapat antara lain Liem Koen Hian: Jurnalis dan pendiri Partai Indonesia Raya (Parindra) serta Persatuan Timur Tionghoa, Oey Tiang Tjoei: Tokoh masyarakat dan pengurus organisasi penunjang persiapan kemerdekaan di Jakarta, Oei Tjong Hauw: Tokoh pengusaha asal Semarang yang memimpin surat kabar Sin Po dan aktif membantu pergerakan nasional, Mr. Tan Eng Hoa: Ahli hukum (meester in de rechten) yang turut serta menyumbang pemikiran dalam sidang perumusan dasar negara

Lagu Indonesia Raya dimuat pertama kali di surat kabar Sin Po pada tanggal 10 November 1928, beberapa waktu setelah pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda Kedua. Pemuatan ini membantu menyebarluaskan lirik dan notasi lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman kepada masyarakat luas. Tanggal Terbit: 10 November 1928. Isi yang Dimuat: Lirik lengkap dan notasi musik lagu Indonesia Raya. Tokoh Penting: Pimpinan Sin Po saat itu, Kwee Kek Beng, berani menerbitkannya meski ada risiko hukuman badan dari pemerintah kolonial Belanda.

Rumah tempat persembunyian Soekarno dan Hatta di Rengasdengklok adalah milik seorang petani dan anggota PETA bernama Djiauw Kie Siong. Kondisinya kini terjaga sebagai bangunan cagar budaya dan berfungsi sebagai museum kecil yang dirawat oleh keturunannya. Lokasi awal: Terletak di Dusun Bojong, Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, di dekat bantaran Sungai Citarum. Alasan dipilih: Tempatnya terpencil, sunyi, dan dianggap aman dari patroli tentara Jepang. Fungsi: Tempat Soekarno dan Hatta diamankan oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945 agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Relokasi bangunan: Pada tahun 1957, bangunan dipindahkan sejauh kurang lebih 150 meter dari tepi

aslinya karena ancaman abrasi Sungai Citarum. Keaslian struktur: Struktur kayu rumah dibongkar dan dipasang kembali dengan teliti sehingga bentuk aslinya tetap dipertahankan. Bagian dalam: Masih mempertahankan tata ruang aslinya, termasuk kamar tidur yang pernah dipakai oleh Bung Hatta lengkap dengan dipan aslinya. Konon keluarga itu pernah di undang Kabinet untuk ikut upacara 17 Agustusan di Istana Negara.

Ringkasan AI menyatakan bahwa anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945 awalnya berjumlah 21 orang yang dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai ketua, Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua, dan K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai anggota. Tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaannya kemudian ditambah enam orang Indonesia sehingga totalnya menjadi 27 orang.

Pimpinan PPKI

- Ir. Soekarno (Ketua)
- Drs. Mohammad Hatta (Wakil Ketua)

Anggota Utama (21 Orang Awal)

- K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
- Ki Bagus Hadikusumo
- K.H. Abdoel Wachid Hasjim
- Mr. Prof. Dr. Soepomo
- R. Pandji Soeroso
- Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo
- Otto Iskandardinata
- Mr. Mohammad Yamin
- Mr. Achmad Soebardjo
- R. Abdoelkadir
- Pangeran Soerjohamidjojo
- Pangeran Poerbojo
- Dr. Mohammad Amir
- Mr. Teuku Mohammad Hasan
- Mr. I Gusti Ketut Pudja
- Johannes Latuharhary
- Andi Pangeran Pettarani
- Abasa Daeng Marala
- Andi Mappanyukki
- Mr. R. Soedirman
- Anang Abdul Hamidhan

Anggota Tambahan (Tanpa Pengetahuan Jepang)

- Sayuti Melik

- Ki Hadjar Dewantara
- R. Kasman Singodimedjo
- Mr. Iwa Koesoemasoemantri
- Prof. Dr. Mr. R. Soepeno
- Mr. Raden Abdul Malik

Anggota Panitia Sembilan dan Perannya

- Ir. Soekarno – Ketua: Memimpin panitia Sembilan.
- Drs. Mohammad Hatta – Wakil Ketua: Membantu pimpinan dan memberi gagasan moderat.
- Mr. Mohammad Yamin – Anggota: Mengusulkan gagasan dasar negara dan menamai naskah "Piagam Jakarta".
- Mr. Achmad Soebardjo – Anggota: Mewakili golongan nasionalis dalam merumuskan kompromi hukum.
- Mr. A.A. Maramis – Anggota: Mewakili golongan nasionalis/kebangsaan dan perumus tatanan keuangan/negara.
- K.H. Wachid Hasyim – Anggota: Mewakili golongan Islam dari Nahdlatul Ulama.
- Haji Agus Salim – Anggota: Mewakili golongan Islam dalam diplomasi rumusan teks.
- Abikoesno Tjokrosoejoso – Anggota: Mewakili golongan Islam dari PSII.
- Kiai Haji Abdul Kahar Mudzakkir – Anggota: Mewakili golongan Islam dari Muhammadiyah.

Ringkasan AI menyatakan bahwa Panitia perumus Pancasila pada tahun 1945 dikenal sebagai Panitia Sembilan, yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Badan khusus ini dibentuk oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta. Tugas Utama: Menyatukan perbedaan pendapat antara golongan Islam dan nasionalis mengenai agama dan negara. Hasil Kerja: Menyusun naskah Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) pada 22 Juni 1945, yang kemudian menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945 dan dasar negara Pancasila.

Ringkasan AI menyatakan bahwa persamaan Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) versi PBB terletak pada pengakuan terhadap persamaan derajat, penghormatan martabat manusia, dan prinsip anti-diskriminasi.

- Persamaan Derajat: Sila kedua Pancasila sejalan dengan Deklarasi Universal HAM PBB yang menjamin hak yang sama di depan hukum tanpa ada perbedaan.
- Kebebasan dan Keadilan: Keduanya menolak perbudakan, penindasan, serta menjunjung tinggi hak hidup dan kebebasan tiap individu.
- Tanpa Diskriminasi: Perlindungan hak warga-negara berlaku rata bagi semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.

Ringkasan AI menyatakan bahwa ancaman pihak asing untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didorong oleh faktor kepentingan penguasaan sumber

daya alam, persaingan pengaruh geopolitik global, serta kekhawatiran atas kebangkitan kekuatan ekonomi nasional. Hal ini diungkapkan oleh para pemimpin negara sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan.

Bentuk Ancaman Asing adalah

- Politik adu domba: Menggunakan taktik pecah belah (*divide et impera*) berbasis SARA untuk melemahkan solidaritas internal antarkelompok masyarakat.
- Intervensi melalui pendanaan: Membiayai lembaga atau pihak tertentu untuk menciptakan konflik sosial dan menggiring opini publik yang merugikan stabilitas negara.
- Eksploitasi kekayaan: Upaya terselubung untuk melemahkan kedaulatan ekonomi agar sumber daya alam Indonesia lebih mudah dikuasai pihak luar.

Cara Menjaga Keutuhan NKRI

- Memperkuat persatuan: Menjaga semangat gotong royong dan tidak mudah terprovokasi oleh isu atau hasutan yang memecah belah.
- Kewaspadaan nasional: Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap segala bentuk intervensi terselubung dari kekuatan asing.
- Kemandirian ekonomi: Mengelola kekayaan alam secara mandiri demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa bergantung pada kekuatan asing.

Ringkasan AI menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyoroti budaya saling menjatuhkan di Indonesia saat peluncuran Biodiesel B50 di Karawang pada 9 Juli 2026. Beliau menyebutnya sebagai mental "bangsa kepiting".

Poin Penting Pidato

- Mental Bangsa Kepiting: Mengibaratkan kebiasaan menarik turun orang lain yang ingin maju, seperti perilaku kepiting dalam ember.
- Dampak Penjajahan: Menyebut sifat iri dan dengki ini sebagai sisa rasa rendah diri dari masa lalu yang panjang, bukan sikap rendah hati.
- Seruan Persatuan: Meminta masyarakat mengakhiri permusuhan demi menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Selamat Ulang Tahun & Dirgahayu NKRI.

Jakarta, 16 Agustus 2026